

Analisis Ketimpangan Akses Pendidikan Perkotaan Dan Pedesaan Di Indonesia Dalam Mendukung SDG 4

Eka Nur Anggraini¹, Rikha Janatul Ma'wa², Firre An Suprpto³, Indah Prabawati⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya
e-mail: 25040674102@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674128@mhs.unesa.ac.id²,
firresuprpto@unesa.ac.id³, indahprabawati@unesa.ac.id⁴.

Abstrak

Salah satu kendala utama bagi Indonesia dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDG) 4 adalah ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. SDG 4 bertujuan untuk menyediakan pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan peluang pembelajaran seumur hidup bagi semua individu. Di Indonesia, terdapat perbedaan yang jelas antara dua bagian sistem pendidikan tersebut. Sekolah-sekolah di daerah perkotaan telah menjadi pusat pembelajaran modern, sementara sekolah-sekolah di daerah pedesaan sering kali menghadapi berbagai tantangan akibat kurangnya infrastruktur fisik dan keterbatasan akses terhadap teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan akses pendidikan di Indonesia serta mengkaji implementasi kebijakan pemerataan pendidikan dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) 4. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui analisis literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan jurnal ilmiah berkualitas tinggi. Temuan studi ini menunjukkan bahwa kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan masih terjadi antara daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif untuk mengurangi ketimpangan pendidikan. Diharapkan distribusi akses terhadap pendidikan di Indonesia akan menjadi lebih merata dan berkontribusi pada pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG) ke-4 secara lebih seimbang.

Kata Kunci: Ketimpangan Akses Pendidikan, Perkotaan Dan Pedesaan, Pemerataan Pendidikan, SDG 4, Pendidikan Inklusif.

Abstract

One of the main challenges for Indonesia in achieving Sustainable Development Goal (SDG) 4 was the inequality in access to education between urban and rural areas. SDG 4 aimed to ensure inclusive and equitable quality education and to promote lifelong learning opportunities for all individuals. In Indonesia, a clear disparity existed between the two segments of the education system. Schools in urban areas had developed into modern learning centers, while schools in rural areas often faced various challenges due to limited physical infrastructure and restricted access to technology. This study aimed to analyze the inequality in access to education in Indonesia and to examine the implementation of educational equity policies in supporting the achievement of SDG 4. The research used a qualitative method with a descriptive approach through literature analysis. The data used in this study were obtained from official publications of Statistics Indonesia (BPS) and scientific journals. The findings of the study showed that gaps in access to education still existed between urban and rural areas in Indonesia. Based on these findings, collaborative efforts were needed to reduce educational inequality. It was expected that the distribution of access to education in Indonesia would become more equitable and contribute to the more balanced achievement of SDG 4.

Keywords : Educational Access Inequality, Urban-Rural Disparity, Educational Equity, SDG 4, Inclusive Education

LATAR BELAKANG

Pendidikan memainkan fungsi yang sangat krusial dalam kehidupan manusia dan seharusnya mampu membawa beragam perubahan bagi individu. Salah satu perubahan tersebut adalah pergeseran dalam strata sosial seseorang, di mana akses terhadap pendidikan harus adil dan merata. Untuk mewujudkan sasaran pendidikan nasional seperti meningkatkan kecerdasan masyarakat dan menciptakan keadilan sosial dalam pendidikan, diperlukan sebuah sistem yang terintegrasi dan dibangun melalui kolaborasi (Simatupang & Yuhertiana, 2021). *Sustainable Development Goal* (SDG)4 menetapkan komitmen ini di tingkat global, dengan menyerukan kepada negara-negara anggota untuk memastikan pendidikan yang adil dan inklusif serta memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua orang. Bagi Indonesia, kewajiban ini bukan sekadar target global, melainkan amanat yang tercantum dalam Pembukaan UUD RI 1945, alinea keempat, "Mencerdaskan Kehidupan Bangsa," menyatakan bahwa Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi hak pendidikan bagi warganya. Ketentuan ini perlu diimplementasikan dalam kerangka hak pendidikan rakyat. Negara memikul tanggung jawab yang besar dalam mengembangkan potensi dan kemampuan setiap individu di Indonesia (Huda & Hidayat, 2021, dalam Pradana dkk., 2025).

Meskipun Indonesia telah mencatat kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM), yang saat ini rata-rata mencapai lebih dari 90% untuk pendidikan dasar, pencapaian ini belum sepenuhnya mencerminkan kesetaraan dalam kualitas pendidikan. Di Indonesia, terdapat kontras yang mencolok antara dua sisi sistem pendidikan. Daerah perkotaan telah berkembang menjadi pusat-pusat pendidikan modern yang dilengkapi dengan fasilitas digital dan laboratorium yang memadai, sementara sekolah-sekolah di daerah pedesaan sering kali menghadapi tantangan terkait keterbatasan infrastruktur fisik dan kurangnya akses terhadap teknologi. Kondisi ini dipertegas oleh hasil kajian Rosmana dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa hingga saat ini, sistem pendidikan Indonesia masih dihadapkan pada berbagai ketimpangan. Hal ini terlihat dari tantangan yang terus berlanjut terkait akses terhadap pendidikan, khususnya di daerah-daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Beberapa faktor utama yang menghambat pencapaian tujuan pendidikan inklusif antara lain distribusi guru yang tidak merata, kurangnya fasilitas, serta kurangnya jaminan kesejahteraan bagi para pendidik.

Wika (2026) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerataan pendidikan di wilayah terpencil masih menghadapi berbagai tantangan struktural, geografis, dan kelembagaan. Meskipun terdapat komitmen normatif dari pemerintah, realitas di lapangan menunjukkan ketimpangan signifikan pada distribusi tenaga pendidik, sarana-prasarana, dan dukungan administratif. Menurut Vega dkk. (2024) kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan teknologi mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila yang menjamin pendidikan inklusif. Sebagai bukti empiris, keberhasilan program "Sekolah Rakyat" di Desa Cisuru menjadi contoh nyata bagaimana sinergi tersebut mampu meningkatkan akses pendidikan secara signifikan.

Perubahan dalam pengelolaan kebijakan publik sangat mendesak dilakukan mengingat banyaknya tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Jika hanya mengandalkan intervensi birokrasi pemerintah untuk menyelesaikan masalah sistemik seperti ketimpangan fasilitas dan pengajaran, hasilnya tidak akan sesuai dengan harapan. Diharapkan hambatan yang menghalangi akses pendidikan di daerah terpencil dapat diatasi dengan cara yang lebih efektif dan berkelanjutan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi melalui pendekatan Pentahelix sebagai strategi utama, yang melibatkan kerja sama antara pemerintah (sebagai regulator), akademisi (untuk konsep dan inovasi), sektor bisnis (dalam hal dukungan finansial

dan tanggung jawab sosial perusahaan), masyarakat (sebagai penggerak lokal), dan media (untuk advokasi publik).

Dalam perspektif administrasi publik, ketimpangan ini bukan sekadar masalah teknis yang berkaitan dengan geografi, hal ini juga dianggap sebagai hambatan tata kelola (*governance*) dan implementasi kebijakan yang masih bersifat egosentris. Seiring waktu, kerja sama dalam konteks kolaborasi sering terhambat oleh ego sektoral dan kurangnya koordinasi horizontal. Hal ini mengakibatkan program-program yang dilaksanakan oleh akademisi, sektor swasta, dan pemerintah pusat sering berjalan secara terpisah tanpa integrasi yang kuat. Kapasitas kelembagaan di tingkat lokal lemah, dan pengawasan terhadap distribusi sumber daya pendidikan tidak memadai. Akibatnya, kebijakan yang dikembangkan tidak sepenuhnya selaras dengan kebutuhan spesifik masyarakat di daerah 3T dan pedesaan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan akses pendidikan di Indonesia serta mengkaji implementasi kebijakan pemerataan pendidikan dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) 4. Pendekatan ini diharapkan dapat mendukung pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi guna mempercepat pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) 4, yang mencakup jaminan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi literatur (*library research*). Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena ketimpangan akses pendidikan di Indonesia berdasarkan data sekunder dan berbagai kajian ilmiah yang relevan. Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan kondisi ketimpangan akses pendidikan di Indonesia dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) 4 tentang pendidikan berkualitas.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan jurnal ilmiah bereputasi. Data BPS yang digunakan meliputi beberapa indikator ketimpangan akses pendidikan, antara lain; angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), rata-rata lama sekolah, angka anak tidak sekolah, serta data fasilitas pendidikan di berbagai wilayah Indonesia. Sementara itu, jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai sumber pendukung untuk memperkuat analisis mengenai ketimpangan akses pendidikan dan implementasi kebijakan pemerataan pendidikan di Indonesia.

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis yang meliputi tiga tahapan, yaitu: 1) reduksi data, dengan memilih dan menyederhanakan data dari BPS yang relevan dengan ketimpangan akses pendidikan; 2) penyajian data dalam bentuk tabel dan narasi deskriptif; 3) penarikan kesimpulan, yaitu menginterpretasikan data untuk melihat bentuk ketimpangan akses pendidikan yang terjadi, faktor-faktor yang memengaruhi, serta kaitannya dengan implementasi kebijakan pemerataan pendidikan dalam mendukung SDGs 4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis data sekunder menunjukkan adanya kesenjangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Kesenjangan tersebut terlihat dari beberapa indikator utama, yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta Angka Anak Tidak Sekolah. Berikut disajikan hasil analisis deskriptif dari masing-masing indikator.

Tabel 1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Klasifikasi Desa APS Tahun 2025

Perkotaan	80.91
Perdesaan	73.30
Perkotaan + Perdesaan	77.86

Sumber: BPS, Susenas

Catatan: Kelompok umur yang digunakan adalah 16-18 tahun

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk di wilayah perkotaan mencapai 80,91%, sedangkan di wilayah perdesaan hanya sebesar 73,30%. Sementara itu, angka partisipasi sekolah secara keseluruhan di wilayah perkotaan dan perdesaan mencapai 77,86%. Data ini menunjukkan adanya kesenjangan yang jelas dalam hal akses terhadap pendidikan antara penduduk perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Penduduk yang tinggal di daerah perkotaan umumnya memiliki tingkat partisipasi pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Situasi ini menunjukkan bahwa upaya untuk menyamakan akses terhadap pendidikan guna mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-4 (SDG 4) masih menghadapi tantangan yang signifikan akibat kesenjangan antardaerah.

Tabel 2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Klasifikasi Desa	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Klasifikasi Desa
	2025
Perkotaan	38,58
Perdesaan	23,14
Perkotaan + Perdesaan	32,89

Sumber: BPS, Susenas

Catatan: Kelompok umur perguruan tinggi yang digunakan adalah 19-23 tahun

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di wilayah perkotaan telah mencapai 38,58%, sedangkan di wilayah perdesaan hanya sebesar 23,14%. Sementara itu, rata-rata partisipasi pendidikan tinggi secara keseluruhan di wilayah perkotaan dan perdesaan berada pada angka 32,89%. Data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang jelas antara masyarakat perkotaan dan pedesaan di Indonesia dalam hal akses ke pendidikan tinggi. Masyarakat di daerah perkotaan memiliki peluang dan tingkat partisipasi yang jauh lebih besar untuk menempuh pendidikan tinggi di tingkat universitas dibandingkan dengan masyarakat di daerah pedesaan. Situasi ini menunjukkan bahwa, untuk mengembangkan tenaga kerja yang terampil di seluruh Indonesia, masih terdapat hambatan yang signifikan dalam mewujudkan akses yang setara ke pendidikan tinggi.

Tabel 3. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas

Klasifikasi Desa	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Klasifikasi Desa
	2025
Perkotaan	10,23
Perdesaan	8,17
Perkotaan + Perdesaan	9,41

Sumber: BPS, Susenas

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas di wilayah perkotaan mencapai 10,23 tahun, sedangkan di wilayah perdesaan hanya sebesar 8,17 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah secara keseluruhan di wilayah perkotaan dan perdesaan mencapai 9,41 tahun. Data tersebut

menunjukkan adanya perbedaan tingkat pendidikan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan di Indonesia. Masyarakat di wilayah perkotaan cenderung memiliki kesempatan menempuh pendidikan lebih lama dibandingkan masyarakat di wilayah perdesaan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerataan akses pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.

Tabel 4. Angka Anak Tidak Sekolah

Daerah Tempat Tinggal	Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Daerah Tempat Tinggal		
	SD / Sederajat	SMP / Sederajat	SMA / Sederajat
	2023	2023	2023
Perkotaan	0,32	5,82	18,50
Perdesaan	1,12	8,45	26,06
Perkotaan + Perdesaan	0,67	6,93	21,61

Sumber: BPS, Susenas

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, angka anak tidak sekolah di wilayah perdesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan pada setiap jenjang pendidikan. Pada jenjang SD/ sederajat, angka anak tidak sekolah di wilayah perdesaan mencapai 1,12%, sedangkan di wilayah perkotaan sebesar 0,32%. Pada jenjang SMP/ sederajat, wilayah perdesaan mencapai 8,45%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan sebesar 5,82%. Sementara itu, pada jenjang SMA/ sederajat, angka anak tidak sekolah di wilayah perdesaan mencapai 26,06%, sedangkan wilayah perkotaan sebesar 18,50%.

Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Indonesia. Tingginya angka anak tidak sekolah di wilayah perdesaan mengindikasikan bahwa akses pendidikan belum merata, terutama pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas sesuai dengan tujuan SDGs 4.

Ketimpangan Akses Pendidikan Di Indonesia Dalam Mendukung SDGs4

Salah satu prioritas utama *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pendidikan, khususnya Tujuan 4, yang menekankan pentingnya akses pendidikan yang adil dan universal bagi semua orang, tanpa memandang tempat tinggal mereka (Siahaan, 2024). Namun, sejumlah indikator pendidikan masih menunjukkan adanya kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Anggraini (2024) Di Indonesia, kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan di antara berbagai kelompok sosial dan wilayah masih menjadi hambatan dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDG) 4. Menurut Ayuningtyas (2021) Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi keluarga, tempat tinggal, dan kurangnya infrastruktur pendidikan terus menjadi hambatan dalam mengakses pendidikan, terutama di daerah pedesaan dan terpencil.

Ketimpangan ini terlihat dari Tingkat Partisipasi Sekolah (TPS), di mana wilayah perkotaan mencatat angka sebesar 80,91%, jauh lebih tinggi daripada wilayah pedesaan yang hanya mencapai 73,30%. Berdasarkan Khotimah (2022). Distribusi partisipasi pendidikan di setiap jenjang merupakan faktor krusial dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 4, terutama pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi.

Indikator Rata-rata Lama Bersekolah (RLB) memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai total waktu yang dihabiskan individu dalam pendidikan formal. Dalam konteks Indonesia, data RLB menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam lamanya masa pendidikan antara penduduk perkotaan dan pedesaan. Penduduk di daerah perkotaan cenderung lebih sering melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau, setidaknya, bertahan lebih lama dalam sistem pendidikan. Sementara itu, penduduk di daerah pedesaan sering kali berada dalam situasi di mana mereka harus menghentikan pendidikan mereka lebih

awal. Hal ini menunjukkan bahwa sejumlah faktor sosio-geografis masih menghambat akses terhadap pendidikan berkelanjutan di daerah pedesaan, sehingga menyulitkan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pendidikan mereka.

Tingkat Partisipasi Kasar (TPK) untuk pendidikan tinggi menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Masyarakat di daerah pedesaan sering kali beranggapan bahwa pendidikan tinggi sulit diakses, sementara masyarakat di daerah perkotaan memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan tinggi. Fakta bahwa TPK di daerah pedesaan tetap rendah menunjukkan bahwa tujuan SDG 4 untuk memastikan akses yang adil terhadap pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas belum sepenuhnya tercapai. Hal ini mencerminkan adanya hambatan struktural di daerah pedesaan yang berkaitan dengan faktor ekonomi dan ketersediaan lembaga pendidikan tinggi.

Kondisi tersebut diperburuk dengan banyak anak di daerah pedesaan yang belum terdaftar dalam sistem pendidikan, Bahkan di tingkat sekolah dasar. Menurut Lestari dkk. (2020) Dua faktor utama yang menyebabkan anak-anak putus sekolah adalah faktor internal, yang berkaitan dengan motivasi belajar siswa, dan faktor eksternal, yang mencakup kondisi ekonomi keluarga serta kualitas fasilitas pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan saat ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang paling rentan di daerah terpencil. Akibatnya, kemungkinan besar anak-anak di desa-desa tersebut akan putus sekolah, yang berisiko membuat kemiskinan terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Secara keseluruhan, indikator APS, APK, dan RLS, serta jumlah anak yang tidak bersekolah, menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan di Indonesia masih belum merata. Masyarakat di daerah pedesaan masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses pendidikan berkualitas. Tantangan-tantangan tersebut meliputi akses kelangsungan pendidikan, dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa *Sustainable Development Goals* (SDG) 4 tercapai secara merata di seluruh Indonesia, diperlukan distribusi fasilitas pendidikan yang lebih merata, peningkatan kualitas guru, serta dukungan ekonomi dan infrastruktur.

Tantangan Pemerataan Pendidikan Di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian, ketimpangan akses pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan yang signifikan dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) 4. Perbedaan capaian pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan belum sepenuhnya terwujud. Rendahnya partisipasi sekolah, rendahnya akses terhadap pendidikan tinggi, perbedaan rata-rata lama sekolah, serta tingginya angka anak tidak sekolah di wilayah pedesaan mengindikasikan adanya hambatan yang bersifat sistemik.

Permasalahan tersebut berkaitan dengan tantangan struktural dalam sistem pendidikan di Indonesia. Menurut Hayati, I. K., dkk. (2025), distribusi tenaga pendidik yang belum merata, keterbatasan fasilitas pendidikan, serta minimnya sarana pendukung pembelajaran menjadi faktor yang menghambat terwujudnya pendidikan yang inklusif, khususnya di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Kondisi ini menyebabkan masyarakat di wilayah pedesaan memiliki akses pendidikan yang lebih terbatas dibandingkan masyarakat di wilayah perkotaan. Daerah perkotaan telah berkembang menjadi pusat pendidikan modern dengan fasilitas digital dan laboratorium yang memadai, sementara sekolah-sekolah di pedesaan sering kali menghadapi keterbatasan infrastruktur fisik dan kurangnya akses terhadap teknologi. Akibatnya, kesempatan untuk memperoleh pendidikan berkualitas belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Selain itu, faktor geografis menjadi tantangan utama dalam pemerataan pendidikan di Indonesia mengingat karakteristik wilayahnya yang luas dan terdiri dari ribuan pulau, sehingga akses ke fasilitas pendidikan di daerah terpencil sering kali sulit dijangkau. Kondisi ini berdampak pada tingginya angka anak tidak sekolah, terutama pada jenjang pendidikan menengah, akibat hambatan jarak, keterbatasan transportasi, serta kondisi ekonomi masyarakat pedesaan yang memengaruhi keberlanjutan pendidikan. Ummaroch dkk. (2026)

menegaskan bahwa meskipun ada komitmen normatif pemerintah, realitas lapangan menunjukkan ketimpangan signifikan pada distribusi tenaga pendidik, sarana-prasarana, dan dukungan administratif di wilayah 3T.

Di sisi lain, tantangan pemerataan pendidikan juga berkaitan dengan aspek kelembagaan dan tata kelola pemerintahan (*governance*). Implementasi kebijakan pemerataan pendidikan masih menghadapi tantangan struktural, geografis, dan kelembagaan. Lemahnya koordinasi antarinstansi serta masih adanya ego sektoral menyebabkan pelaksanaan kebijakan pendidikan belum berjalan secara optimal. Program-program pendidikan yang dijalankan pemerintah, akademisi, maupun sektor swasta sering kali masih berjalan secara terpisah tanpa adanya integrasi yang kuat. Akibatnya, kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat di daerah perdesaan dan wilayah 3T. Dalam perspektif administrasi publik, ketimpangan ini bukan sekadar masalah teknis yang berkaitan dengan geografi, melainkan juga dianggap sebagai hambatan tata kelola (*governance*) dan implementasi kebijakan yang masih bersifat egosentris.

Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, masyarakat, dan media melalui pendekatan Pentahelix menjadi penting untuk mendukung pemerataan pendidikan yang lebih efektif. Keberhasilan program "Sekolah Rakyat" di Desa Cisuru menjadi contoh nyata bagaimana sinergi antara pemerintah dan masyarakat mampu meningkatkan akses pendidikan secara signifikan dan mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila yang menjamin pendidikan inklusif (Vega dkk., 2024). Program yang diinisiasi oleh Kepala Desa Bapak Kiman Kusdianto ini dilaporkan berhasil meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Desa Cisuru hingga 90% dalam kurun waktu 2 tahun (Pemerintah Desa Cisuru, 2023). Dengan adanya kolaborasi tersebut, diharapkan kebijakan pendidikan dapat lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga tujuan SDGs 4 dapat tercapai secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Upaya Pemerintah Dan Kolaborasi Dalam Mendukung Peemerataan Pendidikan

Pendekatan Pentahelix dapat menjadi strategi utama untuk mengatasi tantangan pemerataan pendidikan di Indonesia dan mendukung pencapaian SDGs 4. SDGs 4 menetapkan komitmen global untuk memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua orang. Bagi Indonesia, komitmen ini bukan sekadar target global, melainkan amanat yang tercantum dalam Pembukaan UUD RI 1945, alinea keempat, "Mencerdaskan Kehidupan Bangsa".

Konsep Pentahelix mengacu pada kolaborasi lima elemen utama, yaitu pemerintah sebagai regulator dan penyedia kebijakan, akademisi sebagai penyedia konsep dan inovasi, sektor bisnis dalam dukungan finansial dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), masyarakat atau komunitas sebagai penggerak lokal, serta media untuk advokasi publik dan diseminasi informasi (Rizaq & Sarmini, 2025). Dalam konteks pemerataan pendidikan, Pentahelix menjadi model yang relevan untuk menjawab tantangan yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah secara unilateral saja. Model ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan sosial dan pendidikan.

Peran kelima elemen tersebut bersifat komplementer. Pemerintah mengatur kebijakan pemerataan pendidikan, alokasi anggaran, dan insentif bagi guru yang mengajar di daerah 3T. Akademisi memberikan konsep, penelitian, dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sektor Bisnis memberikan dukungan finansial melalui CSR untuk pembangunan infrastruktur sekolah dan beasiswa. Masyarakat berperan sebagai penggerak lokal yang memastikan program berjalan sesuai kebutuhan desa. Media berperan dalam advokasi publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif.

Solusi teoritis yang dapat diajukan dari pendekatan Pentahelix adalah transformasi dari *government-centered* menuju *collaborative governance*, di mana peran pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor, melainkan sebagai fasilitator yang mengoordinasikan berbagai

pemangku kepentingan. Pendekatan Pentahelix juga dapat menjadi strategi untuk mengatasi ego sektoral serta meningkatkan koordinasi horizontal antar-instansi (Agung, 2025).

Secara praktis, program "Sekolah Rakyat" di Desa Cisuru dapat dijadikan ilustrasi bagaimana sinergi multipihak bekerja. Program yang diinisiasi kepala desa ini berupaya meningkatkan partisipasi pendidikan melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan pemanfaatan teknologi. Praktik ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam menjamin pendidikan inklusif. Penting untuk dicatat bahwa penelitian ini merupakan kajian literatur, sehingga diperlukan studi empiris lanjutan untuk menguji efektivitas pendekatan Pentahelix secara sistematis di berbagai daerah 3T.

Kebijakan pendidikan inklusif memerlukan dukungan yang memadai, baik dalam bentuk fasilitas, sumber daya, maupun pendanaan untuk mendukung implementasi yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan komunitas menjadi kunci utama dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang berkualitas. Panduan pelaksanaan pendidikan inklusif dari Kementerian Pendidikan juga menegaskan bahwa belajar merupakan kerja sama antara guru, orang tua, dan masyarakat, sehingga diperlukan perubahan pola pikir (*mindset*), penataan teknis, kebijakan, budaya, dan pengelolaan kelas serta prinsip adaptasi.

Dengan demikian, kebijakan pendidikan inklusif memerlukan dukungan yang memadai dari seluruh elemen Pentahelix, baik dalam bentuk fasilitas, sumber daya, maupun pendanaan berkelanjutan. Kemendiknas menjelaskan bahwa konsep Pentahelix atau multipihak merupakan sinergi unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media yang bersatu padu berkoordinasi serta berkomitmen untuk mengembangkan potensi lokal (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2021). Tanpa kolaborasi yang terkoordinasi tersebut, upaya pemerataan pendidikan hanya akan bersifat parsial dan tidak mampu mengatasi akar masalah struktural, geografis, dan kelembagaan yang telah dibahas sebelumnya.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan akses pendidikan di Indonesia masih terjadi antara wilayah perkotaan dan perdesaan, terlihat dari indikator APS, APK Perguruan Tinggi, RLS, serta angka anak tidak sekolah yang lebih rendah di desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 4 belum sepenuhnya tercapai karena keterbatasan tata kelola pendidikan, distribusi tenaga pendidik yang belum merata, serta infrastruktur pendidikan yang masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat melalui pemerataan guru, peningkatan fasilitas, program CSR pendidikan, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan agar akses pendidikan lebih merata dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, M. S. M. (2025). Strengthening Governance Through Pentahelix Collaboration: A Qualitative Study In The Era Of Digital Disruptions. *Journal Publicuho*, 8(3), 1619-1626. <https://doi.org/10.35817/Publicuho.V8i3.873>
- Ananda, R., Yuliani, C. K., Misnati, K., Azzikra, R., & Rahmadiyah, P. (2025). Analisis Kesenjangan Layanan Pendidikan Sekolah Dasar Antara Sekolah Perkotaan Dan Daerah 3t Di Indonesia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2), 392-404. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/Pendas/article/view/27468>
- Anggraini, D., & Nugraheni, S. (2024). Menuju Pendidikan Berkelanjutan: Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs) Dalam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (Jppi)*, 1(3), 189-197. <https://doi.org/10.62017/Jppi.V1i3.1028>
- Ayuningtyas, I. (2021). Ketimpangan Akses Pendidikan Di Kalimantan Timur . *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6(2), 117–129. <https://doi.org/10.24832/Jpnk.V6i2.2128>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Dan Daerah Tempat Tinggal, 2023. Diakses Pada 8 Mei 2026, Dari

- <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/mtk4ncmy/angka-anak-tidak-sekolah-menurut-jenjang-pendidikan-dan-daerah-tempat-tinggal.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Angka Partisipasi Murni (Apm) Menurut Provinsi Dan Jenjang Pendidikan. Diakses Pada 8 Mei 2026, Dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/mza0izi=/angka-partisipasi-murni--apm--menurut-provinsi-dan-jenjang-pendidikan.html>
- Badan Pusat Statistik. (2025). Angka Partisipasi Kasar (Apk) Perguruan Tinggi (Pt) Menurut Klasifikasi Desa, 2025. Diakses Pada 8 Mei 2026, Dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/mtq0nsmmy/angka-partisipasi-kasar--apk--perguruan-tinggi--pt--menurut-klasifikasi-desa.html>
- Badan Pusat Statistik. (2025). Angka Partisipasi Sekolah (Aps) Penduduk Umur 7-18 Tahun Menurut Klasifikasi Desa, Jenis Kelamin, Dan Kelompok Umur, 2009-2025. Diakses Pada 8 Mei 2026, Dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/mtyxmymx/angka-partisipasi-sekolah--aps--penduduk-umur-7-18-tahun-menurut-klasifikasi-desa--jenis-kelamin--dan-kelompok-umur--2009-2025.html>
- Badan Pusat Statistik. (2025). Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Klasifikasi Desa, 2025. Diakses Pada 8 Mei 2026, Dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/mtqzmcmy/rata-rata-lama-sekolah-penduduk-umur-15-tahun-ke-atas-menurut-klasifikasi-desa.html>
- El Rizaq, A. D. B., & Sarmini. (2025). Strategic Assessment Of The Pentahelix Model In Addressing Prostitution Issues For Sustainable Social Development. Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial, 1, 191-204. <https://doi.org/10.19105/Ejpis.V1i.19115>
- Hayati, I. K., Sipa, S., Nurpina, A., Aisyah, W. S., Sa'bani, M.S., & Nurdin, N. (2025). Pengelolaan Pendidikan: Strategi Dan Tantangan Dalam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas. Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, 6(3), 662-668. <http://dx.doi.org/10.25157/J-Kip.V6i3.17668>
- Kemenko Pmk. (2021, 20 Februari). Pentahelix, Lima Unsur Kekuatan Dalam Pengembangan Potensi Desa Dan Kawasan Perdesaan Kian Mendapatkan Respon Positif. Diakses Pada 10 Mei 2026, Dari <https://www.kemenkopmk.go.id/pentahelix-lima-unsur-kekuatan-dalam-pengembangan-potensi-desa-dan-kawasan-perdesaan-kian>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. (2021). Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif. Pusat Kurikulum Dan Perbukuan, Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Perbukuan. Diakses Pada 10 Mei 2026, Dari <https://repository.kemdikbud.go.id>
- Khotimah, D. R. K. (2022). Sdgs Achievement On Social Pillars: A Spatiotemporal Analysis Of Education Participation In Indonesia For The 2015 To 2021 Period. Jurnal Educative: Journal Of Educational Studies, 7(1), 79-96. <https://doi.org/10.30983/Educative.V7i1.5431>
- Lestari, A. A. B., Kurniawan, F., & Ardi, R. B. (2020). Penyebab Tingginya Angka Anak Putus Sekolah Jenjang Sekolah Dasar (Sd). Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar, 4(2), 299-308. <https://doi.org/10.23887/Jisd.V4i2.24470>
- Pradana, R. M., Fauzi, A., Budiyanto, & Hazin, M. (2025). Analisis Kebijakan Standar Operasional Perguruan Tinggi Negeri Di Indonesia Yang Berdampak Pada Rencana Kenaikan Uang Kuliah Tunggal. Didaktika: Jurnal Kependidikan 14(2), 2491-2502. <https://www.jurnaldidaktika.org/contents/article/view/1924/1069>
- Puskomedia Indonesia. (2024, 2 April). Menjembatani Jurang Pendidikan: Program Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Terpencil. Diakses Pada 10 Mei 2026, Dari <https://cisuru.desa.id/menjembatani-jurang-pendidikan-program-pemberdayaan-masyarakat-di-daerah-terpencil/>
- Rohmani, Z., Budiana, A. A., & Subhani, A. (2025). Pendidikan Di Daerah 3t (Terdepan, Terluar, Tertinggal): Kondisi Dan Harapan. Eduversity Journal Of Future Interdisciplinary Education, 1(1), 15-20. <https://gumpublisher.id/index.php/ijfie/article/view/4/6>

- Rosmana, P. S., Iskandar, S., Fadilah, N., Azhar, N., Oktavini, D. & Munte, A. C. (2022). Upaya Pemerataan Pendidikan Berkelanjutan Di Daerah 3t. *Attadib: Journal Of Elementary Education*, 6(2), 405-418. https://Jurnalfai-Uikabogor.Com/Index_Php/Attadib/Article/Download/1212/764.Pdf
- Siahaan, R. L. M., Juli Arianti, & Thalib, N. (2023). Perkembangan Pendidikan Berkualitas Di Indonesia: Analisis Sdgs 4. *Indo-Mathedu Intellectuals Journal*, 4(2), 975–985. <https://doi.org/10.54373/Imej.V4i2.316>
- Simatupang, E. & Yuhertiana I. (2021). Merdeka Belajar Kampus Merdeka Terhadap Perubahan Paradigma Pembelajaran Pada Pendidikan Tinggi: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Ekonomi*, 2(2), 30-38. <https://pdfs.semanticscholar.org/246e/4e899d96e56e42f8044dc46255325d4ee9e7.Pdf>
- Sutan, A. J., & Setiawan, H. . (2024). Collaborative Governance Pentahelix: Inovasi Membangun Kota Pendidikan Inklusif Menuju Tatanan Sumber Daya Unggul (Kajian Pemenuhan Pendidikan Masyarakat Disabilitas Di Kota Yogyakarta). *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan*, 4(2), 202–216. <https://doi.org/10.55480/Saluscultura.V4i2.311>
- Ummaroch, R., Kurniadi, D., & Tinus, A. (2026). Harmonisasi Tata Kelola: Mengurai Benang Kusut Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Daerah Di Era Otonomi. *J-Ses : Journal Of Science, Education And Studies*, 5(1), 154-163. <https://doi.org/10.30651/Jses.V5i1.31278>
- Vega, A., Maharani, I. V. A., Putri, J. A., Hartono, M. R. A. M., & Navridya, R. U. (2025). Kesetaraan Akses Pendidikan: Analisis Pengimplementasian Nilai Pancasila Dalam Pemerataan Akses Pendidikan Di Indonesia. *Lentera Ilmu*, 1(2), 44–57. <https://journal.ciraja.com/index.php/jli/article/view/51>
- Wika, M. (2025). Antara Komitmen Dan Realita: Studi Kualitatif Terhadap Kebijakan Pemerataan Pendidikan Di Wilayah Terpencil Merauke. *Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 4(1), 89–96. <https://doi.org/10.31004/Riggs.V4i1.376>